

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011).
- Brouwer J., dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998).
- Center For Financial Policy Studies. *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Center For Strategic and International Studies. *Kliping Dunia Ekuin dan Perbankan*. (Jakarta: CSIS, 2000).
- Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Adminitrasi*. (Malang: Banyumedia Publisng, 2004).
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradan Administrasi terhadap Tindak Pemerintah*. (Bandung: Alumni, 2004).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Hadjon, Philipus M. dalam Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. (Yogyakarta: UII Pers, 2014).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang, Makalah*. (Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, 2000).
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*. (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006).
- Hayek, Friedrich August Von. *Tanggung jawab individu*. (Jakarta: Pradya Paramitha, 2001).

- HD, Stout. *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni, 2004).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004).
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Harapan, 2003).
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kelsen, Hans (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
- \_\_\_\_\_. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta, AND1, 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).
- Rubini dan Chaidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1984).

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

Stroink, A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Widiyono. *Wewenang dan Tanggung Jawab*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.

### C. Jurnal

Mukti, Syahrul Ansyari Fajar Ginanjar. “Kerugian BLBI Ditanggung Seluruh Rakyat Indonesia”. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1166377-kerugian-blbi-ditanggung-seluruh-rakyat-indonesia>, diakses 13 April 2021.

Nurhayani. “Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)”. *Lex Jurnalica*, Vol. 4 No.1, Desember 2006.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

Yustianti, Surti. “Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. *ACTA DIURNAL - Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

### D. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).